GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan **Tgl/Bln/Thn : 13/11/2004**

Subyek : **Hari : Sabtu**

Kata Kunci : **Halaman : 3**

Menko Polkam dan Menko Bidang Perekonomian Bahas Kasus Buyat

Berharap Pemerintah Mengusut Tuntas Semua Pihak yang Terlibat

JAKARTA - Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan di Teluk Buyat dan Ratatotok, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru. Agenda pembahasan kasus Buyat yang semula akan digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ternyata berubah. Menurut rencana, rapat yang akan dimulai Sabtu (13/11) siang ini akan dihadiri pula oleh Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Bidang Perekonomian beserta sejumlah menteri terkait lainnya.

Penambahan jumlah peserta rapat tersebut semakin menguatkan anggapan bahwa kasus Buyat memang tidak terlepas dari aspek ekonomi dan politik. Informasi mengenai perubahan acara dan keikutsertaan para Menko itu diakui Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta Jumat (12/11) malam, Rachmat menyambut baik perluasan wilayah pembahasan kasus Buyat.

"*Iya* saya juga baru tahu tadi siang mengenai keikutsertaan Menko Politik, Hukum dan Keamanan serta Menko Perekonomian.

Bagi saya itu perkembangan positif. Artinya teman-teman di kementrian lain mulai menyadari bahwa kasus ini berkaitan dengan banyak aspek," kata Rachmat yang baru kembali dari Hanoi, Vietnam menghadiri pertemuan para menteri lingkungan hidup ASEAN mengenai masalah asap.

Sebagaimana diketahui, Tim Teknis Kasus Buyat telah menyimpulkan bahwa di Teluk Buyat dan Ratotok telah terjadi pencemaran lingkungan. Mantan anggota Tim Teknis, Raja P Siregar mengungkapkan, hasil penelitian mereka menemukan organisme bentos (hewan dasar laut) dan plankton di Teluk Buyat tercemar berat.

Selain itu, tim menyimpulkan bahwa mengonsumsi ikan dari Teluk Buyat adalah berisiko bagi anak-anak maupun orang dewasa karena pada tubuh ikan bisa terdapat arsenik dan merkuri.

Kesimpulan tim yang berulangkali menunda mengumumkan hasil kerjanya itu sekaligus menepis keraguan sejumlah kalangan aktivis lingkungan hidup mengenai ketegasan pemerintah dalam kasus tersebut.

Hasil kerja tim yang dibentuk Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim itu juga berbeda dengan hasil penelitian Badan Kesehatan Dunia (WHO), Minamata Institute dan PT Newmont Minahasa Raya yang dituding sebagai pelaku pencemaran serta sejumlah lembaga penelitian lainnya.

Lepas dari persoalan tersebut, sejumlah kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertekad memantau tindak lanjut pemerintah terhadap hasil kerja tim itu. "Kita melihat adanya konspirasi antara pengusaha pertambangan dengan sejumlah pejabat tinggi di pemerintah kita di masa lalu. Mari kita pantau bersama komitmen pemerintah untuk menegakkan arti penting lingkungan," kata Jhonson Panjaitan, pengacara sejumlah LSM yang melaporkan Nabiel Makarim ke Mabes Polri dengan tuduhan memberikan informasi menyesatkan mengenai kasus Buyat.

Terkait Langsung

Para aktivis juga berharap pemerintah mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan tersebut. Penegasan tersebut diungkapkan dua mantan anggota Tim Teknis kasus Buyat, Siti Maemunah dan Indro Sugianto. Menurut keduanya, Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga harus mendapat perhatian khusus karena terkait secara langsung dengan praktik bisnis pertambangan.

"Departemen itu (ESDM) paling tertutup ketika kita menanyakan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran yang dilakukan perusahaan pertambangan," tegas Siti Maemunah.

Indro Sugianto mengungkapkan, dalam rapat Tim Teknis, wakil dari Departemen ESDM bersikap sangat defensif ketika sejumlah anggota tim lainnya mempertanyakan komitmen departemen tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pencemaran oleh perusahaan pertambangan.

"Sepengetahuan saya, departemen itu bisa mencabut izin usaha perusahaan tambang, jika terbukti ditemukan bukti mereka tidak melaksanakan Rencana Kelola Lingkungannya," tegas Indro. Menanggapi kekhawatiran kalangan LSM, Rachmat Witoelar menegaskan, pihaknya akan menyerahkan semua hasil kajian timnya kepada menteri-menteri yang hadir dalam rapat Selasa siang ini.

"Kami punya sejumlah bukti adanya pencemaran lingkungan. Jika menteri-menteri lain punya bukti atau data lain, silakan ungkapkan. Tapi sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup mereka bisa memahami arti penting pelestarian lingkungan tanpa mengabaikan aspek lainnya," tambah mantan Duta Besar Indonesia di Rusia itu.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP